

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Teori Dasar Penelitian

Teori agensi ialah suatu teori yang diimplementasi dalam organisasi masa kini dengan maksud pemilik perusahaan mempekerjakan tenaga kerja yang profesional untuk mengelola perusahaan. Tenaga kerja disebut sebagai agen, dan pemilik perusahaan disebut sebagai *principal*. Dilakukan pemisahan dalam mengelola perusahaan agar perusahaan dapat berjalan efektif dan efisien karena mempunyai karyawan yang handal sesuai dengan kemampuan mereka untuk menjalankan kewajibannya masing-masing (Tandiontong, 2016, p. 5).

Tugas agen tentunya leluasa melaksanakan kegiatan operasional perusahaan, namun tetap mementingkan kinerja perusahaan karena bilamana keuntungan perusahaan besar, para agen juga mendapatkan keuntungan tersebut. Peran pemilik perusahaan ialah melakukan pengawasan dan memantau pelaksanaan tugas yang dikerjakan oleh agen dalam manajemen perusahaan. Pemilik juga perlu mempertimbangkan pemberian insentif supaya memastikan agen bekerja demi kepentingan perusahaan (Tandiontong, 2016, p. 5).

Agency theory memaparkan perlu adanya jasa auditor independen sebagai penengah hubungan antara *principal* dan *agent*. Apabila perusahaan semakin besar, maka konflik semakin berkemungkinan untuk muncul, yaitu antara pemilik dengan manajemen yang menjalankan aktivitas perusahaan. Masalah yang muncul tersebut

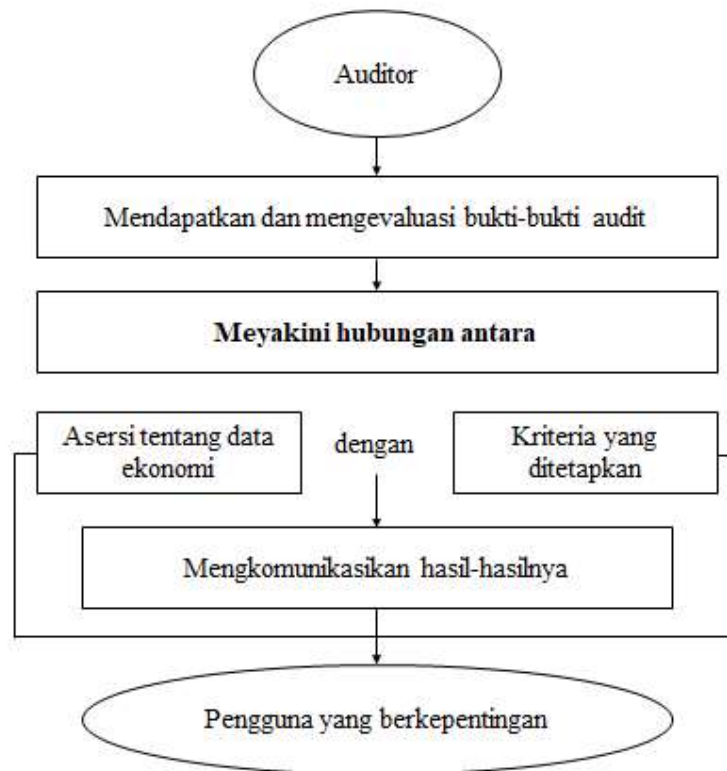
disebut sebagai *agency problem*. Cara yang digunakan untuk mengurangi permasalahan yang terjadi diperlukan pihak independen yang dikenal sebagai independensi auditor untuk memeriksa apakah terdapat ketidaksesuaian antara informasi yang disajikan dengan standar yang berlaku (Tandiontong, 2016, p. 5).

2.2. Definisi *Auditing*

Auditing merupakan aktivitas mengumpulkan dan menilai bukti terkait informasi yang digunakan dalam melakukan penentuan dan pelaporan tingkat keselarasan antara informasi yang diberikan dengan standar yang ditentukan. Kriteria dalam audit sangat bervariasi sesuai dengan informasi apa yang diaudit. Contohnya, KAP yang mengaudit laporan keuangan historis dapat menerapkan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau disebut sebagai *International Financial Reporting Standards*, audit terhadap pengendalian internal bisa memakai kerangka kerja yang diterbitkan oleh *Committee of Sponsoring Organization (COSO)* yaitu *Internal Control – Integrated Framework*, audit dalam SPT pajak kriterianya ada pada *internal revenue code*. *Auditing* wajib dilaksanakan oleh orang yang memiliki sikap independen dan berkompeten (Arens, Alvin A.; Elder, Randal J.; Beasley, 2014, p. 2).

Auditing artinya proses terstruktur atau sistematis dalam memperoleh dan menilai bukti secara faktual terkait aktivitas maupun peristiwa ekonomi dengan tujuan meyakinkan derajat kesesuaian antara asersi dengan standar yang telah ditentukan, serta melaporkan hasil temuannya kepada pihak-pihak berkepentingan. Suatu audit adalah alat yang dimaksudkan untuk individu ditanggung oleh orang lain

terkait mutu, status ataupun kondisi tertentu yang terdapat proses pengujian oleh penjaminnya (Tandiontong, 2016, pp. 71; 74; 76). Dari pengertian tersebut tersaji dalam bentuk gambar 2.1 berikut ini.



Gambar 2.1 Pengertian *Auditing* Menurut Proses Kerja Auditor

Berdasarkan penjelasan yang dipaparkan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa *auditing* adalah suatu kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan secara sistematis sesuai dengan prosedur untuk memperoleh bukti-bukti dari aktivitas ekonomi perusahaan dan mengevaluasi hasil yang diperoleh dengan standar kriteria yang ditentukan untuk memberikan pendapat yang akan disampaikan dengan pihak yang berkepentingan.

2.3. Auditor

Auditor merupakan orang independen dan memiliki kompetensi dalam melaksanakan audit. Tujuan auditor mengaudit laporan keuangan yaitu untuk mengeluarkan opini auditor atas kesesuaian penyajian laporan keuangan yang berkaitan dengan posisi keuangan atau neraca, hasil operasi atau laba rugi, dan aliran kas terhadap prinsip akuntansi yang berlaku umum. Setelah melaksanakan proses audit, seorang auditor akan memberikan laporan hasil audit sebagai media penyampaian opininya. Auditor wajib bertanggungjawab atas opini yang dikeluarkannya, karena merupakan pandangan auditor berdasarkan keahlian profesional yang dimilikinya (Tandiontong, 2016, p. 71).

Masyarakat sangat memerlukan profesi audit untuk mendapatkan *early warning* dalam pemilihan alternatif keputusan. Informasi yang dibutuhkan masyarakat terutama adalah informasi mengenai kelanjutan usaha *auditee*. Auditor independen menyajikan informasi tersebut dalam laporan auditor. Maka dari itu, Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menerbitkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) berkenaan dengan ruang gerak auditor. Salah satu penekanan dalam standar ini adalah tanggung jawab auditor, dimana auditor wajib memberikan penilaian apakah terdapat kekhawatiran besar pada kesanggupan entitas dalam menjalankan aktivitas operasionalnya pada masa waktu yang pantas. Jika ada kesangsian, maka auditor sepantasnya memberikan opini selain dari opini wajar tanpa pengecualian (Tandiontong, 2016, p. 73).

Tanggung jawab auditor dalam audit adalah melakukan deteksi salah saji yang nilainya besar atau material dalam laporan tahunan suatu usaha. Tanggung jawab auditor dalam mengidentifikasi salah saji material mencakup hal yang tertera dalam tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1 Salah Saji Laporan Keuangan

No.	Istilah/ Frasa	Keterangan
1	Salah saji yang material versus tidak material	Salah saji umumnya dianggap material jika gabungan dari kekeliruan dan kecurangan yang belum dikoreksi dalam laporan keuangan kemungkinan akan mengubah atau mempengaruhi keputusan orang yang menggunakan laporan keuangan tersebut. Walaupun sulit mengukur materialitas, auditor bertanggung jawab untuk memperoleh kepastian yang layak bahwa ambang batas materialitas ini telah dipenuhi. Namun diperlukan biaya yang sangat besar (dan mungkin mustahil) bagi auditor untuk memikul tanggung jawab menemukan semua kekeliruan dan kecurangan yang tidak material.
2	Kepastian yang layak	Kepastian atau <i>assurance</i> merupakan ukuran tingkat kepastian yang diperoleh dari auditor pada saat menyediakan audit. Standar <i>auditing</i> mempunyai tanggung jawab untuk memberi tahu pemakai melalui laporan auditor. Setelah penerbitan laporan, jika fakta-fakta yang ada menunjukkan bahwa laporan tersebut tidak disajikan secara wajar, auditor mungkin harus memberi tahu ke pengadilan atau lembaga pengatur bahwa ia telah melaksanakan audit dengan cara yang tepat dan menarik kesimpulan yang layak.

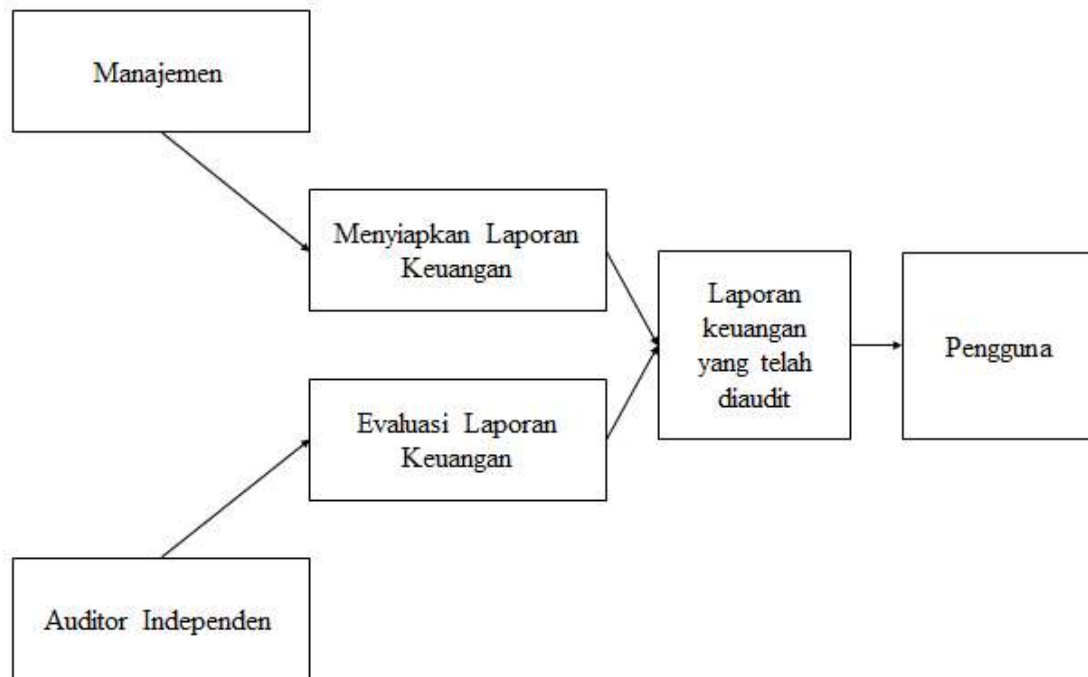
Sumber: Jasa Audit dan *Assurance* (Arens, Elder, & Beasley, 2012, p. 170)

Jika auditor melaporkan mengenai keefektifan pengendalian internal perusahaan dalam hal pelaporan keuangan, auditor bertanggung jawab pula dalam hal mengidentifikasi kelemahan material yang ada pada pengendalian internal pelaporan keuangan. Selain itu, auditor memiliki tanggung jawab atas kepastian yang layak,

namun tidak sepenuhnya, dikarenakan alasan-alasan (Arens, Alvin A.; Elder, Randal J.; Beasley, 2014, p. 171):

1. Dari pengujian sampel populasi seperti persediaan atau piutang usaha dijadikan sebagai bukti. Bukti tersebut tidak secara keseluruhan karena hanya berupa sampel.
2. Auditor menggunakan bukti audit yang bersifat persuasif namun tidak meyakinkan karena pengujian akuntansi meliputi estimasi yang kompleks sehingga adanya ketidakpastian dan juga peristiwa-peristiwa di masa mendatang mempengaruhi hal tersebut.

Tanggung jawab manajemen adalah harus mengadopsi kebijakan akuntansi yang benar, menerapkan pengendalian internal yang cukup dan membuat laporan keuangan yang dapat dipercaya, sepantasnya atau wajar untuk manajemen perusahaan. Alasannya karena manajemen perusahaan lebih memahami transaksi dan operasional perusahaan sehari-hari dibandingkan auditor. Berbeda dengan auditor yang terbatas pengetahuannya tentang kondisi perusahaan karena waktu memperoleh hal tersebut hanya pada saat audit (Arens, Alvin A.; Elder, Randal J.; Beasley, 2014, p. 169). Gambar 2.2 menyajikan peranan manajemen dan auditor independen (Tandiontong, 2016, p. 75).



Gambar 2.2 Peranan Manajemen dan Auditor Independen

2.4. Jenis-Jenis Audit

Dalam *auditing*, akuntan publik melaksanakan 3 jenis audit, yaitu (Arens, 12,13,15):

Tabel 2.2 Jenis Audit

No.	Jenis Audit	Definisi	Contoh
1.	Audit Operasional	Audit yang mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi.	Mengevaluasi efisiensi dan akurasi pemrosesan transaksi penggajian dengan sistem komputer yang baru dipasang.
2.	Audit Ketaatan	Audit yang dilaksanakan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan, atau ketentuan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi.	Review tarif upah untuk melihat ketaatan dengan ketentuan upah minimum.

Tabel 2.2 Tabel Lanjutan

3.	Audit Laporan Keuangan	Audit ini menentukan apakah penyajian laporan keuangan telah sesuai dengan kriteria tertentu, biasanya berdasarkan standar akuntansi internasional.	Mengidentifikasi risiko-risiko tentang strategi klien, yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan secara wajar.
----	------------------------	---	---

Sumber: Buku Jasa Audit dan *Assurance* (Arens, Alvin A.; Elder, Randal J.; Beasley, 2014)

2.5. Standar *Auditing*

Standar *auditing* berisi kriteria kualitas kinerja auditor independen, pertimbangan audit, dan penyusunan laporan audit. Standar *auditing* terdiri dari:

Tabel 2.3 Standar *Auditing*

Standar Umum	
1.	Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
2.	Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
3.	Pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.
Standar Pekerjaan Lapangan	
1.	Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
2.	Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
3.	Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.
Standar Pelaporan	
1.	Laporan keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
2.	Konsistensi penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
3.	Pengungkapan yang memadai.
4.	Pernyataan pendapat.

Sumber: Buku Kualitas Audit (Tandiontong, 2016, p. 69)

2.6. Opini Audit *Going Concern*

Opini *going concern* merupakan suatu postulat yang terdapat dalam laporan tahunan perusahaan. Perspektif ini mengevaluasi perusahaan dalam beroperasi maupun secara finansial mempunyai kelangsungan bisnis yang berkelanjutan. Jika perusahaan gagal dalam bisnisnya, laporan keuangan perusahaan menggunakan basis realisasi. Perusahaan yang beroperasi secara berkesinambungan dalam kurun waktu melebihi satu tahun atau melebihi dari satu periode akuntansi menggunakan akuntansi berbasis akrual untuk penerbitan laporan keuangannya. Dengan kata lain, perusahaan tidak mempunyai rencana untuk melikuidasi bisnisnya atau mengakhiri usaha perusahaan tersebut (M. P. Purba, 2016, p. 22).

Indikator dalam penilaian kelangsungan usaha dapat dilihat dari kendala yang terjadi dalam internal perusahaan maupun eksternal. Kendala internal berupa kendala yang ada di perusahaan itu sendiri, misalnya tenaga kerja, budaya perusahaan, kondisi keuangan perusahaan, pengendalian internal, dan penguasaan teknologi. Kendala eksternal seperti kondisi sosial, pasar, politik, dan lain sebagainya. Indikator tersebut harus diperhatikan dalam mengevaluasi apakah ada indikasi keraguan terhadap kemampuan suatu perusahaan dalam mempertahankan bisnisnya (M. P. Purba, 2016, p. 33).

Dalam mengungkapkan ketidakpastian atau keraguan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan bisnisnya dapat melihat tingkat keraguan perusahaan yang tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4 Tingkat Keraguan Perusahaan dan Implikasi Dalam Laporan Keuangan

No.	Tingkat Keraguan	Implikasi Dalam Laporan Keuangan
1.	Tidak ada keraguan atau ada keraguan kecil antara 10% - 30%.	Tidak perlu mengungkapkan asumsi <i>going concern</i> .
2.	Keraguan signifikan yaitu, 30% - 55%.	Mempertimbangkan pengungkapan bahwa akan terdapat keraguan, penyebab adanya keraguan, rencana manajemen, dan potensi penyesuaian.
3.	Keraguan besar, yaitu 55% - 85%.	Harus mengungkapkan adanya keraguan, penyebab adanya keraguan, rencana manajemen, dan potensi penyesuaian.
4.	Keraguan sangat besar, yaitu 85% - <100%.	Harus mengungkapkan informasi tentang adanya keraguan besar atas kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Akrua atas kerugian yang dapat diestimasi. Jika tidak bisa diestimasi, perlu mengungkapkan informasi terkait dengan adanya potensi penyesuaian.
5.	Ketidakpercayaan atas asumsi <i>going concern</i> yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan, yaitu 100%.	Harus mengungkapkan bahwa dalam penyusunan laporan keuangan tidak dapat menggunakan asumsi <i>going concern</i> . Laporan keuangan harus menerapkan basis likuidasi atau realisasi dan laporan keuangan disajikan dengan menggunakan prinsip lain selain SAK.

Sumber: Buku Asumsi *Going Concern* (M. P. Purba, 2016, p. 49)

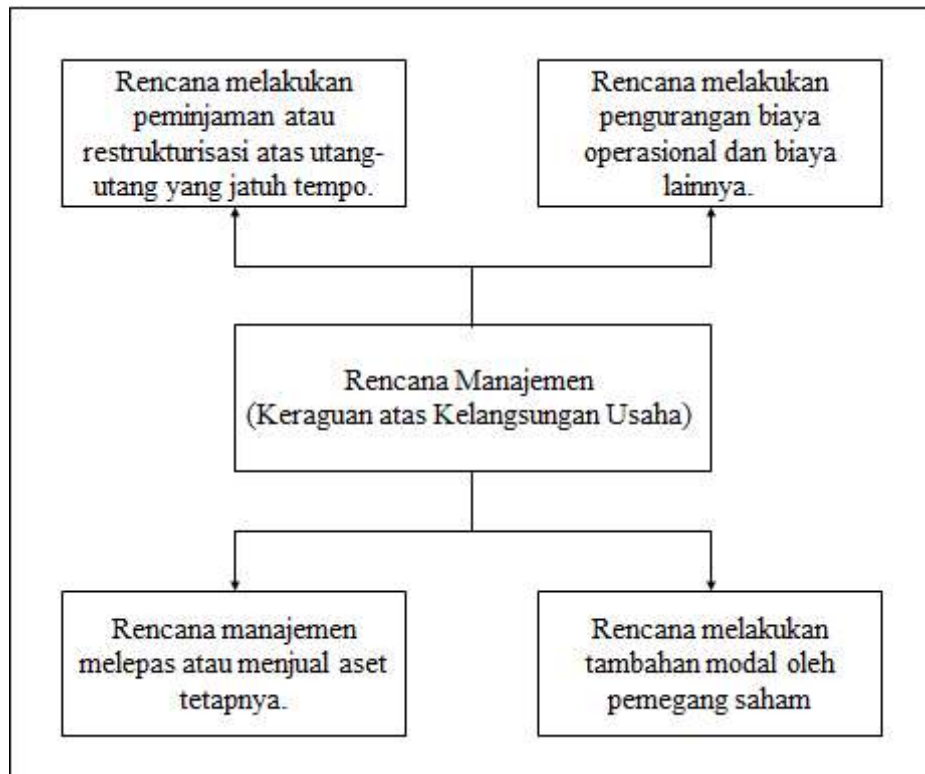
Berikut tabel 2.5 adalah hal-hal atau keadaan perusahaan yang perlu adanya pengungkapan di catatan atas laporan keuangan terkait ketidakpastian kemampuan perusahaan dalam mempertahankan usahanya.

Tabel 2.5 Keadaan yang Diungkapkan Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan

No.	Isu	Pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan
1.	Keraguan substansial	Kondisi-kondisi yang mempengaruhi keraguan substansial mengenai kelangsungan usaha perusahaan.
2.	Dampak	Dampak kondisi yang ada terhadap perusahaan yang akan lebih baik jika diungkapkan dalam jumlah potensi kerugian.
3.	Langkah-langkah manajemen	Evaluasi yang dilakukan oleh manajemen terkait dengan kondisi-kondisi yang timbul dari keraguan signifikan termasuk faktor-faktor yang dapat mengurangi dampak kondisi tersebut.
4.	Penghentian usaha	Kemungkinan-kemungkinan penghentian usaha atau suatu segmen usaha.
5.	Rencana manajemen	Semua rencana manajemen yang akan dilakukan untuk menghadapi sikap dampak ketidakpastian dan apakah rencana-rencana tersebut dapat mengatasi keraguan substansial atas kelangsungan usaha perusahaan.
6.	Saldo-saldo yang terkena dampak	Informasi terkait realisasi aset dan liabilitas yang terkena dampak dari kondisi-kondisi yang ada.

Sumber: Buku Asumsi *Going Concern* (M. P. Purba, 2016, p. 49)

Ada atau tidaknya keraguan substansial terhadap kelangsungan usaha perusahaan juga dapat dilihat dari rencana-rencana manajemen yang dilakukan dalam waktu dekat. Berikut merupakan gambar rencana-rencana manajemen yang layak dipertimbangkan (M. P. Purba, 2016, p. 38).



Gambar 2.3 Rencana Manajemen atas Keraguan Kelangsungan Usaha

Auditor membuat penilaian atas kemampuan perusahaan melanjutkan kegiatan operasional berdasarkan pada laporan keuangan dari manajemen. Seandainya ada keraguan mempertahankan kelangsungan usaha, manajemen harus mengungkapkan seluruh hal-hal yang berhubungan atas kesangsian tersebut. Implikasi audit eksternal dalam asumsi *going concern* tercantum dalam SA 341 dan telah diubah menjadi SA 570 yang berlaku mulai 1 Januari 2013 untuk emiten. Perbedaan standar audit tersebut tersaji di gambar 2.4 berikut ini (M. P. Purba, 2016, p. 29).

Tidak berlaku lagi Seksi 341, “Pertimbangan Auditor atas Kemampuan Entitas dalam Mempertahankan Kelangsungan Hidupnya.” SA Seksi 341 par.2: “Auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah terdapat kesangsiian besar terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode waktu pantas, tidak lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit (selanjutnya periode tersebut akan disebut dengan jangka waktu pantas)....”	Berlaku sejak 1 Januari 2013 (emiten) dan 1 Januari 2014 (non emiten) Seksi 570 “Kelangsungan Usaha.” SA Seksi 570 par.6: “Tanggung jawab auditor adalah untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang ketepatan penggunaan asumsi kelangsungan usaha oleh manajemen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk menyimpulkan apakah terdapat suatu ketidakpastian material tentang kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya....” SA 570 par.12: “Auditor harus mengevaluasi penilaian manajemen atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.”
--	---

Gambar 2.4 Perbedaan SA 341 dan SA 570

2.5. Debt Default

Debt adalah uang dengan jumlah tertentu atau objek yang bisa dievaluasi dengan uang dan didapatkan dari pihak-pihak lain dengan perjanjian bahwa pihak yang menerima akan melakukan pelunasan atau memenuhi kewajibannya. *Default* merupakan keberatan, kelalaian, kegagalan seorang debitur dalam membayar utangnya kepada pihak kreditur berkaitan dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Dari definisi *debt* dan *default* dapat dirangkum bahwa *debt default* adalah ketidakmampuan debitur dalam melunasi utang beserta bunganya kepada kreditur sesuai kesepakatan jatuh tempo.

Umumnya, semua perusahaan mempunyai tujuan yang selaras, yaitu untuk mendapatkan keuntungan (N. M. B. Purba & Effendi, 2019). Namun tidak semua perusahaan dapat memperoleh keuntungan di setiap periode akuntansi, ada pula perusahaan yang terus merugi hingga gagal melakukan pembayaran hutangnya yang telah jatuh tempo. Informasi yang menunjukkan apakah perusahaan sanggup membayar utangnya dengan tepat waktu bisa dilihat dari laporan keuangan perusahaan tersebut. Bilamana perusahaan bisa membayar utangnya pada saat jatuh tempo, maka perusahaan tersebut dianggap berada di posisi *non default*. Sebaliknya, perusahaan dianggap berada di posisi *default* bilamana perusahaan tidak bisa membayar utangnya pada saat jatuh tempo atau telah melewati batas waktu yang telah disetujui kedua belah pihak.

Gagal dalam menyelesaikan kewajiban dan bunga juga menggambarkan indikator penilaian *going concern* yang sering dipakai oleh auditor untuk mengevaluasi keberlangsungan suatu bisnis. Auditor dapat menggunakan status hutang suatu perusahaan sebagai cikal bakal penilaian kesehatan keuangan usaha tersebut. Saat hutang perusahaan sangat banyak, menyebabkan arus kas suatu perusahaan menjadi turun karena digunakan untuk melunasi hutangnya, dalam hal ini akan mengganggu kegiatan operasional perusahaan. Jika hutang yang melebihi batas waktu pembayaran tidak dilunasi, maka terdapat potensi diterimanya laporan *going concern* dari auditor (Imani, Galan Khalid; Nazar, Muhammad Rafki; Budiono, 2017).

Debt default juga merupakan tahap-tahap kegagalan bisnis disebabkan oleh perusahaan tidak mampu menciptakan kas dari bisnis yang dijalannya untuk membayar hutang-hutang yang jatuh tempo. Jika perusahaan pailit pengurusan dan penyelesaian masalah dilakukan oleh kurator yang diawasi hakim pengawas (UU Nomor 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang). Keputusan pailit ditentukan oleh lembaga peradilan dan kemungkinan dapat dilakukan peninjauan kembali dan perdamaian antara pihak yang menggugat pailit dan pihak yang digugat sebelum keputusan tersebut bersifat final (M. P. Purba, 2016, p. 26).

2.6. Reputasi Kantor Akuntan Publik

Kantor akuntan publik merupakan kantor memperoleh izin dari Menteri menjadi tempat untuk akuntan publik menyediakan fasilitas jasanya (PMK No. 17/PMK.01/2008). Kualitas kantor akuntan publik sering diwakilkan dengan reputasi kantor akuntan publik. Reputasi kantor akuntan publik memperlihatkan kemampuan sikap profesional dan independen auditor saat menjalankan audit. Klasifikasi Kantor Akuntan Publik (KAP) secara internasional yaitu (Arens, Alvin A.; Elder, Randal J.; Beasley, 2014, p. 29):

1. *Big Four*, yaitu 4 KAP terbesar di Amerika Serikat yang melaksanakan audit pada hampir seluruh perusahaan besar di Amerika ataupun skala internasional dan mempunyai cabang di seluruh dunia, yaitu Delloite, KPMG, Pricewaterhouse Coopers, Ernst & Young.

2. Kantor nasional, yaitu KAP yang memiliki cabang di kota besar dan berafiliasi dengan KAP negara lain yang memiliki keahlian tingkat internasional.
3. Kantor regional dan kantor lokal besar, yaitu KAP yang hanya mempunyai 1 kantor atau mempunyai beberapa cabang di satu negara, dan menyediakan jasa audit untuk klien yang jaraknya dekat dari wilayah kantornya.
4. Kantor lokal kecil, yaitu KAP yang karyawannya kurang dari 25 orang pekerja profesional dan hanya memiliki satu kantor, merupakan entitas nirlaba.

Menurut IAI, KAP di Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu:

1. KAP yang menjalin kerja sama dengan KAP asing.
2. KAP yang tidak menjalin kerja sama dengan KAP asing.

Mengambil kesimpulan dari penjelasan tersebut, maka reputasi KAP dapat dibagi menjadi:

1. KAP nasional yang berafiliasi dengan KAP internasional *big four*, dapat dilihat dari KAP di Indonesia yang melakukan kerjasama dengan KAP internasional *big four*, yaitu Delloite, Pricewaterhouse Coopers, Ernst & Young, dan KPMG.
2. KAP nasional yang bekerja sama dengan KAP internasional *non big four*, dapat dilihat dari KAP di Indonesia yang melakukan kerjasama dengan

KAP internasional tetapi tidak termasuk dalam *big four*, yaitu Kreston International, Moore Stephens, DFK International.

3. KAP nasional, dapat dilihat dari KAP Indonesia yang mempunyai banyak cabang di kota besar dan kantor utama berlokasi di kota besar Indonesia.
4. KAP regional dan lokal besar, dapat dilihat dari KAP yang pendirian kantornya di kota besar Indonesia dan beberapa di antaranya memiliki cabang di daerah lain namun tidak di kota-kota besar. KAP ini hanya melayani klien yang jaraknya terjangkau atau dekat dengan wilayah kantor.
5. KAP lokal kecil, dapat dilihat dari KAP yang berdiri sendiri, mempunyai orang tenaga kerja profesional di bawah 25 orang dan tidak memiliki cabang.

2.7. Opini Audit Tahun Sebelumnya

Pernyataan opini audit tahun sebelumnya apakah perusahaan tergolong *going concern* dapat diamati dari laporan keuangan tahun sebelumnya. Perusahaan yang menerima opini audit *going concern* umumnya akan memiliki kondisi ketidakpercayaan investor, karyawan, pelanggan, maupun kreditor, penurunan harga saham, menjadi sulit untuk meningkatkan modal pinjaman (Fahmi, 2015). Untuk menghindari opini audit *going concern* pada periode saat ini maupun memperbaiki penilaian *going concern* yang diberikan tahun lalu, perusahaan harus berusaha memperbaiki kinerjanya.

2.8. Peneliti Terdahulu

Berikut ini adalah peneliti terdahulu dari penelitian yang dilakukan.

Tabel 2.6 Peneliti Terdahulu

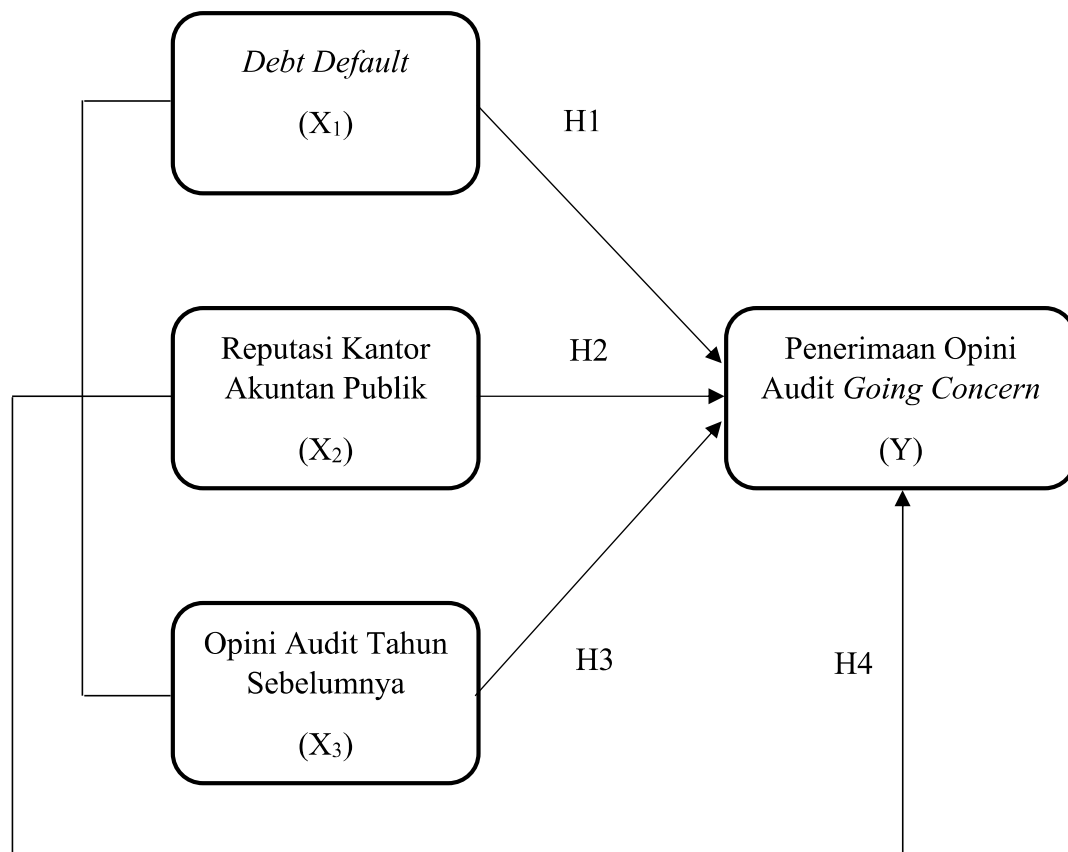
No.	Keterangan	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Mahdi Salehi ISSN: 1753-8394 Tahun: 2018 (Salehi, Tarighi, & Sahebkar, 2018)	<i>The Impact of Auditor Conservatism on Accruals and Going Concern Opinion: Iranian Angle</i>	Variabel independen: <i>abnormal accruals, big auditor, tobin's q, LnAsset, LEV, ROA, MB, LnAge, sale growth, CFO</i> Variabel dependen: <i>going concern audit opinion</i>	1. Terdapat hubungan signifikan bernilai negatif antara reputasi KAP dan akrual dekresiasi terhadap <i>going concern</i> . Reputasi auditor memiliki peran penting dalam mengungkapkan opini audit <i>going concern</i> karena efektif dalam mengurangi manipulasi data.
2.	Jose Luis Gallizo dan Ramon Saladrighes ISSN: 2014-3214 Tahun: 2015 (Gallizo & Saladrighes, 2015)	<i>An Analysis of Determinants of Going Concern Audit Opinion: Evidence from Spain Stock Exchange</i>	Variabel independen: <i>ROA, debt, CR, LIQ, size, big auditor</i> Variabel dependen: <i>going concern opinion</i>	1. Penyajian kerugian dan diaudit oleh auditor skala kecil, yang meningkatkan kemungkinan perusahaan menerima opini audit <i>going concern</i> .

Tabel 2.6 Tabel Lanjutan

3.	ISSN: 2337-3806 Tahun: 2015 (Harris & Merianto, 2015)	<i>Disclosure</i> , Opini Audit Tahun Sebelumnya, Ukuran Perusahaan, dan <i>Opinion Shopping</i> Terhadap Penerimaan Opini Audit <i>Going Concern</i>	<i>debt default</i> , <i>disclosure</i> , opini audit tahun sebelumnya, ukuran perusahaan, dan <i>opinion shopping</i> Variabel dependen: penerimaan opini audit <i>going concern</i>	1. <i>Debt default</i> , audit tahun sebelumnya, dan <i>opinion shopping</i> berpengaruh signifikan terhadap penerimaan opini audit <i>going concern</i> . 2. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit <i>going concern</i> .
4.	Debby Tandungan dan I Made Mertha ISSN: 2302-8556 Tahun: 2016 (Tandungan & Mertha, 2016)	Pengaruh Komite Audit, Ukuran Perusahaan, <i>Audit Tenure</i> , dan Reputasi KAP Terhadap Opini Audit <i>Going Concern</i>	Variabel independen: komite audit, ukuran perusahaan, <i>audit tenure</i> , dan reputasi KAP Variabel dependen: opini audit <i>going concern</i>	1. Komite audit, ukuran perusahaan, <i>audit tenure</i> dan reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap opini audit <i>going concern</i> .
5.	Ni Putu Evi Kusumayanti dan Ni Luh Sari Widhiyani ISSN: 2302-8556 Tahun: 2017 (Kusumayanti & Widhiyani, 2017)	Pengaruh <i>Opinion Shopping</i> , <i>Disclosure</i> dan Reputasi KAP Pada Opini Audit <i>Going Concern</i>	Variabel independen: <i>opinion shopping</i> , <i>disclosure</i> dan reputasi KAP Variabel dependen: opini audit <i>going concern</i>	1. <i>Opinion shopping</i> , <i>disclosure</i> dan reputasi KAP berpengaruh pada opini audit <i>going concern</i> .

2.9. Kerangka Pemikiran

Peneliti menggunakan 3 variabel bebas pada penelitian ini, yaitu *debt default*, reputasi kantor akuntan publik, dan opini audit tahun sebelumnya. Variabel terikat menggunakan variabel opini audit *going concern*. Untuk mempermudah pemahaman kerangka pemikiran penelitian, dibuatlah paradigma sebagai berikut:



Gambar 2.5 Kerangka Pemikiran

2.10. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- H₁ : *Debt default* memiliki pengaruh signifikan terhadap opini audit *going concern*.
- H₂ : Reputasi kantor akuntan publik memiliki pengaruh signifikan terhadap opini audit *going concern*.
- H₃ : Opini audit tahun sebelumnya memiliki pengaruh signifikan terhadap opini audit *going concern*.
- H₄ : *Debt default* dan reputasi kantor akuntan publik, dan opini audit tahun sebelumnya secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap opini audit *going concern*.